

ABSTRAK

Sistem perparkiran di Kabupaten Banyumas menghadapi persoalan kompleks seperti maraknya parkir liar, ketidaksesuaian tarif dengan regulasi, serta kebocoran retribusi yang menyebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perparkiran dalam perspektif ekonomi politik dengan menyoroti distribusi sumber daya, kepentingan aktor, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Teori kelembagaan Douglas Cecil North digunakan untuk memahami dinamika institusi formal dan informal dalam penyelenggaraan perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dan pelaksanaan kebijakan belum optimal akibat lemahnya pengawasan, perbedaan kepentingan antar aktor, serta praktik informal seperti ketidakpatuhan juru parkir dalam penyetoran retribusi. Masyarakat juga mengalami beban tarif yang tidak sesuai aturan, sementara pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan perparkiran di Banyumas sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, transparansi ekonomi, serta legitimasi politik. Reformasi tata kelola, peningkatan pengawasan, dan perbaikan mekanisme kerjasama diperlukan untuk memaksimalkan potensi PAD dari sektor perparkiran.

Kata kunci: Ekonomi Politik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik